



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. MUKHSIN JAMIL
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN
3. NHK : 740635

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.215.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 236.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, NISSAN VL MINI BUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.505.200

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.508.505.200

III. HUTANG Rp. 20.405.535

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.488.099.665



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.